

Kesadaran Tersamar Komunitas dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Tengah Pandemi COVID-19

Lutfi Amiruddin^{1,*}, , Genta Mahardhika Rozalinna¹, , dan Primadiana Yunita², 

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

² Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

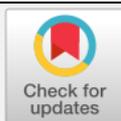
Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

* Korespondensi: amiruddin.lutfi@ub.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitan



Sitasi Cantuman:

Amiruddin, L., Rozalinna, G. M., & Primadiana, Y. (2021). The Vague Awareness of Communities in the Singhasari Special Economic Zone Development during the COVID-19 Pandemic. *Society*, 9(2), 490-503.

DOI: [10.33019/society.v9i2.298](https://doi.org/10.33019/society.v9i2.298)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 21 Januari, 2021;

Diterima: 29 Maret, 2021;

Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

ABSTRAK

Proses pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari pada wisata heritage belum memperhatikan sosialisasi kepada warga setempat. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak pada proses pembangunannya. Dengan situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan masyarakat pegiat budaya dan pelaku pariwisata di kawasan KEK Singhasari. Melalui konsep kesiapan masyarakat dengan menelusuri dan menganalisis data kualitatif, penelitian ini menemukan dua hal penting; pertama, masyarakat pegiat budaya dan pariwisata masih dalam tingkat kesiapan kesadaran yang samar (*vague awareness*). Model kesadaran ini bermula dari penyebaran informasi yang tidak jelas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunitas ini hanya mendapatkan informasi dari gosip di antara mereka sendiri. Kedua, pandemi COVID-19 yang memperlambat proses pembangunan dimaknai sebagai hukuman Tuhan bagi penyelenggara KEK. Interpretasi ini berkaitan dengan kurangnya keterbukaan informasi publik mengenai proses pembangunan KEK. Kedua hasil ini menunjukkan bahwa ada gejala krisis dalam mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Industri Pariwisata; Kesiapan; Pandemi COVID-19

1. Pendahuluan

Pemerintah menetapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Singosari merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2029. Kecamatan Singosari merupakan salah satu daerah yang terpilih sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Hal ini dikarenakan Kecamatan Singosari merupakan salah satu daerah yang terpilih sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata karena memiliki keunggulan potensi wisata *heritage* dan sejarah. Di kawasan ini terdapat cagar budaya, seperti Candi Singosari, Candi Sumberawan, Arca Dwarapala, dan peninggalan Kerajaan Singosari lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan objek wisata *heritage* dengan mengembangkan pencarian situs bersejarah dan meningkatkan pelestarian situs, candi, dan artefak peninggalan sejarah lainnya. Selain itu, pengembangan kawasan ini juga merupakan objek wisata sejarah.

Terkait dengan rencana tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang tahun 2011-2015 menjelaskan bahwa permasalahan objek wisata *heritage* di kawasan Singosari yaitu sarana transportasi, dan infrastruktur untuk mencapai objek wisata masih mengalami kesulitan terutama kondisi jalan yang rusak. Selain itu, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata *heritage* dan kurangnya keterpaduan perencanaan antar objek wisata *heritage*; masih rendahnya pengelolaan destinasi wisata *heritage* dalam mengemas daya tarik wisata menjadi produk dan paket wisata ([Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2015](#)).

Menurut pendapat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Kabupaten Malang memiliki potensi wisata, antara lain obyek wisata *heritage* dan sejarah berupa peninggalan candi. Namun, pengelolaan situs bersejarah tersebut belum maksimal karena minimnya investasi. Perkembangan wisata pura juga terkendala oleh lokasi pura yang berada di sekitar pemukiman padat penduduk. Penelitian untuk mengeksplorasi lokasi baru sulit dilakukan karena lahan yang sempit dan minimnya anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang ([Krisnawati & Suprihardjo, 2014](#)).

Dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, diharapkan potensi wisata *heritage* dapat dikembangkan. Demikian pula, masyarakat dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Masyarakat lokal merupakan bagian penting dari proses pembangunan KEK seluas 120,3 Ha tersebut. Masyarakat yang tinggal di kawasan tiga desa yang menjadi lokasi KEK tentu bisa merasakan dampak dari pembangunan ini. Kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi akan mengalami perubahan sejalan dengan proses pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2019. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia memproyeksikan akan ada 6.863 tenaga kerja yang terserap pada tahun 2030, dengan proyeksi nilai investasi sebesar Rp11,92 Triliun ([Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2019](#)).

Proses pembangunan yang dimulai dengan pembelian tanah warga sudah dilakukan sejak 2019. Warga di tiga desa yang memiliki tanah, rumah, dan sawah yang termasuk dalam lokasi KEK tersebut harus menjual aset tersebut kepada pengembang. Begitu juga dengan masyarakat yang memiliki usaha kecil, seperti toko kelontong hingga pedagang makanan, terkena dampak proyek ini.

Namun, penyebaran pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 berdampak besar pada sektor industri pariwisata global. Kajian dampak pandemi terhadap sektor pariwisata global yang

dilakukan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO), misalnya, menunjukkan terjadi penurunan sebesar 22% pada kuartal I 2020. Pada Maret 2020 turun drastis sebesar 57%, yang berarti hilangnya 67 juta kedatangan internasional dan penurunan pendapatan sekitar USD 80 miliar (United Nations World Tourism Organization, 2020). Sementara itu, organisasi World Travel and Tourism Council memperingatkan bahwa ada 50 juta pekerjaan di sektor industri pariwisata global yang berpotensi hilang (Faus, 2020). Meski sektor pariwisata terdampak pandemi, pembangunan KEK Singhasari tetap dilanjutkan. Proses pembebasan lahan terus berlanjut di desa-desa tempat KEK berada, meski prosesnya tidak secepat sebelum pandemi.

Dengan semua dinamika di atas, menjadi penting untuk melihat seberapa siap kelompok masyarakat di zona KEK. Oleh karena itu, kesiapan masyarakat setempat mempengaruhi keberhasilan pengembangan industri pariwisata. Misalkan ada dampak positif yang diperoleh masyarakat sekitar industri pariwisata, seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat menimbulkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Nian *et al.*, 2019). Tanpa dukungan masyarakat lokal, keberlangsungan industri pariwisata akan terancam. Komunitas lokal adalah titik fokus untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan (Nunkoo & Ramkissoon, 2011). Dengan demikian, komunitas penggiat budaya dan pariwisata memiliki peran penting dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

Dua subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini, yaitu komunitas penggiat budaya dan pelaku wisata *heritage*. Komunitas penggiat budaya ini dianggap sebagai kelompok yang melestarikan artefak pada bangunan candi, arca, dan peninggalan lainnya serta berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional yang ada. Sementara itu, pelaku wisata *heritage* telah mendukung keberlangsungan industri pariwisata, seperti penjaga candi dan pedagang makanan di sekitar candi. Dengan hadirnya KEK, kelompok-kelompok ini diproyeksikan akan terkena dampak langsung dari perkembangan industri pariwisata yang lebih masif. Dua kelompok inilah yang akan mendapatkan dampak secara langsung dari pembangunan KEK Singhasari.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan kelompok pegiat budaya dan pelaku pariwisata di kawasan KEK Singhasari untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Jadi, dalam penelitian ini subjek yang dipilih adalah kelompok pegiat budaya dan pelaku penggerak pariwisata yang aktif atau tinggal di zona pengembangan pariwisata yang termasuk dalam KEK Singhasari.

2. Kajian Pustaka

2.1. Riset Terdahulu

Penelitian terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata telah banyak dipublikasikan. Beberapa di antaranya terkait dengan dampak pandemi, meski banyak membahas inovasi di sektor pariwisata. Candra & Rekha (2020) misalnya dengan pengukuran kuantitatif menemukan bahwa pelaku pariwisata tidak hanya terkena dampak secara ekonomi tetapi juga psikologis. Sementara itu, Riadil (2020) mengungkap dampak COVID-19 dengan menggunakan perspektif pekerja pariwisata, seperti hotel, restoran, dan tempat wisata, yang mulai menyadari bahwa pandemi dapat mengancam pekerjaan mereka. Fathurrahim (2020) tentang pariwisata Lombok menyatakan bahwa dampak terhadap industri pariwisata berlipat ganda ketika berada dalam kondisi pascabencana, seperti gempa 2018 dan pandemi 2020. Sementara dari sisi wisatawan, Uğur & Akbiyik (2020) menyatakan banyak wisatawan yang

akhirnya membatalkan perjalanan wisata melalui aplikasi online, baik transportasi maupun akomodasi.

Meski berdampak besar, berbagai inovasi pariwisata bermunculan. Kaushal dan Srivastava menemukan bahwa kehadiran COVID-19 membuat sektor pariwisata di India melakukan berbagai penyesuaian untuk bertahan, seperti membiasakan diri menggunakan masker dan mencuci tangan bagi para pelaku pariwisata (Kaushal & Srivastava, 2020). Inovasi lain muncul dalam pariwisata digital (Gunagama *et al.*, 2020).

Di tingkat kebijakan, juga ada penelitian tentang kebijakan pemulihan. Dengan membandingkan Indonesia dengan Thailand, Rosyadi (2021) memaparkan kapasitas pemerintah kedua negara dalam strategi pemulihan industri pariwisata selama pandemi. Rosyadi menilai kapasitas pemerintah Thailand agak lebih baik dalam memulihkan pariwisata dan menularkan virus, meski ditemukan praktik korupsi di dalamnya. Rosyadi mungkin tidak melihat bahwa praktik korupsi dana bantuan publik juga terjadi di Indonesia.

Jika penelitian di atas mengkaji dampak pandemi dan inovasi di sektor pariwisata, maka penelitian ini mengambil sisi yang berbeda. Kami melihat proyek pengembangan pariwisata di masa pandemi juga perlu memperhatikan bagaimana kesiapan masyarakat lokal, seperti para pegiat budaya dan pelaku wisata *heritage* menghadapi pembangunan infrastruktur ini. Industri pariwisata diasumsikan sedang berkembang, dan masyarakat lokal adalah pemangku kepentingan yang akan dan akan terkena dampaknya. Untuk itu, sangat penting untuk melihat kesiapan masyarakat setempat dalam menghadapi perubahan tersebut. Sudut pandang inilah yang membedakan makalah ini dengan penelitian sebelumnya. Di saat yang sama terdapat situasi bencana pandemi yang menjadi konteks sosial yang berpengaruh pada industri pariwisata. Sudut pandang inilah yang membedakan studi ini dengan penelitian sebelumnya.

Kajian tentang kesiapan masyarakat menghadapi KEK dilakukan oleh Rachman & Syamsudin (2019). Mereka mencoba mendeskripsikan persepsi dan kesiapan masyarakat Pandeglang dalam menghadapi KEK Kawasan Wisata Tanjung Lesung. Ada dua hal yang dikaji oleh Rachman & Syamsudin (2019) yaitu persepsi dan kesiapan masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner dari 400 responden didapatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap KEK cukup baik. Demikian pula kesiapan masyarakat dikategorikan dalam posisi siap menghadapi KEK (Rachman & Syamsudin, 2019). Yang perlu diperhatikan dari publikasi Rachman dan Zainudin adalah tidak dicantumkan, dan indikator konsep persepsi dan kesiapan tidak dijelaskan.

Kajian tentang kesiapan masyarakat menghadapi KEK selanjutnya bersumber dari Lintjewas *et al.* (2015). Studi mereka melihat tingkat kesiapsiagaan melalui indikator pengetahuan, sikap, dan respon. Melalui analisisnya, ditemukan bahwa responden dianggap siap menerima jika pemerintah menetapkan wilayah mereka sebagai wilayah rencana pengembangan KEK. Namun dilihat dari faktor kemampuan masing-masing individu menunjukkan bahwa masyarakat masih belum siap. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih kurang pengetahuan, juga belum pernah mengikuti pelatihan di bidang industri (Lintjewas *et al.*, 2015). Dibandingkan dengan Rachman & Syamsudin (2019), Lintjewas *et al.* (2015) menggunakan beberapa indikator penting dalam mengukur pengetahuan, sikap, dan tanggapan masyarakat.

Sebagai KEK yang sedang dibangun, perlu juga dilakukan penelitian terkait kesiapan komunitas di tengah proses pembangunan KEK Singhasari. Penelitian kami melanjutkan logika penelitian yang telah dibangun Rachman & Syamsudin (2019) dan Lintjewas *et al.* (2015). Proses pembangunan KEK yang dilakukan di tengah bencana pandemi menjadi pembeda yang signifikan yang berkonsekuensi pada temuan kami.

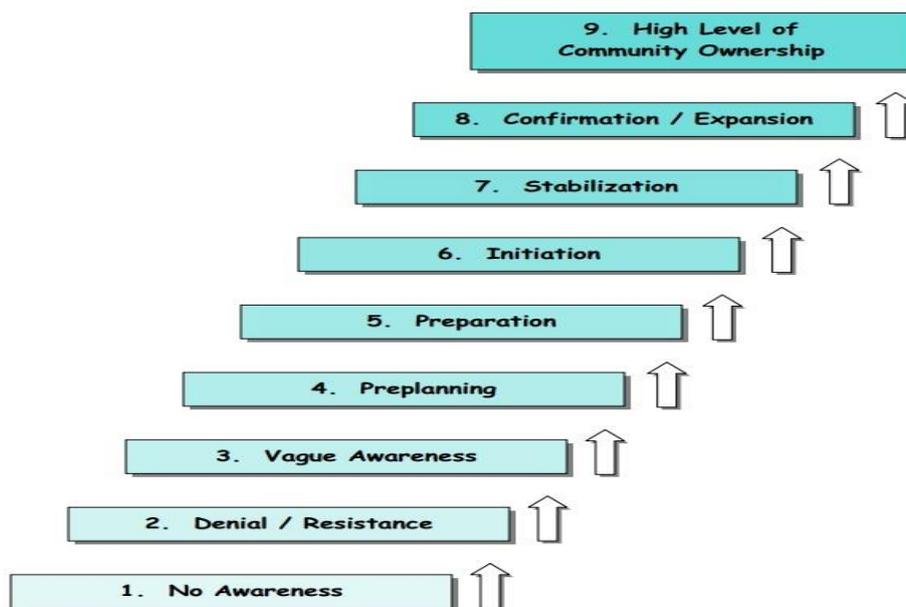
2.2. Kesiapan Komunitas

Meski telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, KEK tidak serta merta terbentuk. Undang-undang ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Barulah pada tahun 2012 KEK pertama di Indonesia, yaitu KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terbentuk. Dari peraturan pemerintah ini, KEK lahir di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu KEK yang ditetapkan adalah KEK Singhasari, Kabupaten Malang, yang didirikan pada 27 September 2019, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. KEK Singhasari dibangun untuk mengembangkan kawasan wisata dan zona pengembangan teknologi. Namun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini, Bupati Malang berwenang menetapkan badan usaha yang membangun dan mengelola KEK Singhasari dalam waktu 90 hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan (Republik Indonesia, 2019).

Menetapkannya sebagai zona KEK juga berarti munculnya sumber ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Namun, perlu diketahui bagaimana masyarakat setempat memahami dan mempersiapkan diri menghadapi sumber ekonomi baru ini. Semakin banyak orang yang siap menghadapi sumber ekonomi baru, semakin mudah untuk terlibat dalam sistem baru. Atau dengan kata lain, semakin siap masyarakat di kawasan KEK Singhasari, maka akan semakin mudah proses untuk terlibat di KEK.

Untuk menggambarkan kesiapan masyarakat lokal yang termasuk dalam zona KEK Singhasari, diambil model kesiapan komunitas (*Community Readiness Model (CRM)*). *Community readiness* dipahami sebagai derajat atau sejauh mana suatu komunitas mengambil tindakan untuk menghadapi masalah-masalah tertentu. Tingkat kesiapan terendah dapat berkisar dari “tidak siap sama sekali” hingga “turut serta dalam memecahkan masalah tertentu” (Plested *et al.*, 2006). Kesiapan komunitas dianggap sebagai faktor utama yang menentukan apakah suatu program dapat dilaksanakan secara efektif dan didukung oleh komunitas lokal (Edwards *et al.*, 2000).

Tingkat kesiapan suatu komunitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Tingkatan kesiapan komunitas (Plested *et al.*, 2006)

Menurut Plested *et al.* (2006), beberapa dimensi digunakan untuk mengukur kesiapan komunitas, antara lain:

- 1) Upaya komunitas. Berkaitan dengan sejauh mana upaya masyarakat untuk mengatasi masalah tertentu.
- 2) Pengetahuan komunitas terkait upaya adalah sejauh mana anggota masyarakat mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi masalah, termasuk apakah upaya tersebut dapat melibatkan seluruh anggota komunitas.
- 3) Kepemimpinan. Membahas sejauh mana dan bagaimana komunitas memilih pemimpin dan anggota komunitas yang berpengaruh untuk memecahkan masalah.
- 4) Iklim komunitas. Dimensi ini membahas masalah bagaimana sikap anggota komunitas dalam menghadapi masalah tertentu. Untuk apa sikap ini diambil? Apakah karena keberdayaannya atau ketidakberdayaannya?
- 5) Pengetahuan komunitas tentang masalah tertentu. Dimensi ini mengkaji sejauh mana anggota komunitas menyadari masalah, konsekuensinya, dan dampaknya terhadap komunitas mereka.
- 6) Sumber daya untuk mengatasi masalah. Dimensi ini berkaitan dengan sumber daya yang dapat digunakan komunitas untuk mengatasi masalah, seperti kuantitas anggota komunitas, waktu, uang, dan ruang.

3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan situasi lapangan empiris ke dalam pola-pola yang saling terkait menjadi suatu konsepsi tentang fenomena perubahan sosial budaya tertentu. Menurut Denzin & Lincoln (2010), penelitian kualitatif berfokus pada seni interpretasi. Secara teknis, peneliti diharuskan melakukan interpretasi dalam tiga langkah yang terdiri dari pembuatan teks lapangan (*field text*) meliputi catatan lapangan dan dokumen; membuat kembali teks lapangan dalam bentuk dokumen interpretasi; dan menghasilkan teks umum (*public text*) yang akan hadir di depan pembaca (Denzin & Lincoln, 2010). Metode kualitatif adalah metode untuk mengembangkan fenomena yang diteliti, yang meliputi deskripsi tindakan, aktor, dan proses di mana tindakan itu tertanam (Dey, 1993).

Dengan metode kualitatif, tim peneliti mencoba mencari dan memahami permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kesiapan komunitas penggiat budaya dan komunitas penggerak pariwisata akan kehadiran KEK Singhasari. Dengan demikian, peneliti memperoleh data yang mendalam untuk menggambarkan kondisi kesiapan masyarakat terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Namun, harus diakui bahwa dengan penelitian kualitatif, cakupan kelompok (subjek) yang diteliti menjadi lebih kecil. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang dapat mencakup lebih banyak orang yang diteliti.

Untuk membantu mengidentifikasi masalah lapangan, tim peneliti berhasil masuk ke jaringan organisasi budaya Singosari. Sejak 2019, organisasi ini mencoba mengawal perkembangan KEK. Tujuannya agar keberadaan KEK Singhasari tidak merugikan masyarakat sekitar. Dalam penelitian, jaringan ini memberikan masukan awal mengenai kondisi dan situasi pandemi di wilayah sekitar KEK. Jaringan ini akhirnya menjadi salah satu narasumber penelitian.

Ada tiga teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, dan studi dokumen. Mereka yang terlibat dalam FGD ini adalah tim peneliti yang beranggotakan lima orang dari organisasi kebudayaan di Singosari. Lokasi diskusi berada di luar wilayah Kecamatan Singosari, dengan penerapan protokol kesehatan

yang ketat. Acara FGD diisi dengan penjelasan mengenai kondisi terkini Singosari, perkembangan proyek KEK, serta pengetahuan dan kesiapan masyarakat secara umum. Pada kesempatan ini, tim peneliti juga menggali lebih dalam kesiapan organisasi ini, baik secara komunal maupun individual.

Teknik selanjutnya yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan orang yang diwawancarai secara online menggunakan alat komunikasi *online* Google Meet. Narasumber yang dipilih untuk teknik ini adalah tokoh agama dan budaya serta pelaku pariwisata yang dapat mengakses fasilitas teknologi informasi digital. Karena model observasi langsung dengan datang langsung ke daerah Singosari masih merupakan hal yang berisiko, teknik ini diganti dengan pengumpulan dokumen sekunder berupa tulisan, gambar, atau karya yang sudah tersedia. Dokumentasi yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, berita pelaksanaan program KEK, dan gambar/foto objek wisata *heritage*.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Kesadaran Tersamar (*Vague Awareness*) Komunitas dalam Pembangunan KEK

Berdasarkan penelusuran informan, belum ada proses sosialisasi resmi yang menunjukkan apa dan bagaimana pembangunan KEK nantinya. Informasi tentang pembangunan KEK tersebar dari mulut ke mulut, bukan melalui bahasa yang sama. Informasi yang tersebar pun bukan sebagai proyek infrastruktur pariwisata yang besar, melainkan melalui bahasa yang berbeda-beda. Beberapa informan menyebutnya pembangunan lapangan sepak bola, pembangunan rest area, pembangunan sarana olahraga, dan ada juga yang mengatakan hanya pembangunan kawasan wisata. Salah satu informan mengetahui bahwa akan ada proyek besar untuk membangun tempat wisata yang sering ia dengar dari orang-orang yang mengunjungi kedai kopinya, dan ia baru mendengarnya sekitar setahun yang lalu. Namun informan ini tidak mengetahui jika pembangunan KEK akan berhubungan dengan situs budaya seperti candi. Pembangunan KEK ini tentunya sudah melalui persetujuan pihak desa, tetapi belum ada sosialisasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah desa atau penyelenggara pembangunan KEK.

Proses awal pembangunan berupa pembelian tanah kepada warga di tiga desa telah dilakukan sejak sebelum tahun 2019. Terdapat tanah tegalan yang luas yang telah diuruk dengan tanah, yang terletak tepat di dekat pintu masuk salah satu desa. Banyak di antara para petani juga sedang melakukan proses penjualan tanah tegalan. Para petani pemilik lahan mau menjual tegalan mereka karena ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran yang menyebabkan mereka mulai menjual lahan mereka. Di salah satu desa terdapat 24 hektar tanah yang akan digunakan untuk pembangunan hotel dan perumahan.

Tiga desa yang merupakan lokasi KEK ini diberkahi dengan sumber air yang cukup bahkan di musim kemarau karena masyarakat mengelola sumber daya yang luas yang disebut Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM). Setiap bulan masyarakat pengguna air hanya dikenakan biaya tiga ribu rupiah untuk setiap meter kubik air. Menurut informan, pembangunan KEK ini jelas akan mengganggu kebutuhan air rumah tangga mereka. Ada juga risiko konflik horizontal di antara warga karena gangguan pada distribusi air. Dengan berkurangnya daerah resapan air dan vegetasi, suhu akan semakin panas, dan cadangan air tanah juga akan semakin menipis. Pembangunan infrastruktur fisik ini tentunya akan mempengaruhi aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

Informan menyatakan terdapat dua cara penyebaran informasi di tengah warga. Pertama, informasi mengenai pembagunan KEK disampaikan oleh camat kepada masyarakat. Kedua,

informasi disebarakan melalui desas-desus di antara warga. Namun, untuk model informasi yang pertama, ternyata Camat tidak menjelaskan secara detail adanya rencana pembangunan KEK. Informasi yang disampaikan hanya pada persiapan pembangunan hotel. Tidak tersebarnya informasi mengenai KEK secara transparan kepada publik, tentu berdampak pada pengetahuan dan kesiapan masyarakat. Situasi ini menempatkan kesiapan masyarakat pada level “*vague awareness*”, yang diartikan sebagai kesadaran yang tersamarkan (Plested *et al.*, 2006). Batas antara yang jelas dan yang tidak jelas menjadi cukup sulit untuk didefinisikan. Artinya komunitas pegiat budaya dan aktor wisata mengetahui akan ada rencana pembangunan infrastruktur di wilayah mereka, tetapi di saat yang sama mereka tidak mengetahui informasi terperinci proyek pembangunan infrastruktur besar tersebut. Padahal hal ini berkaitan dengan bagaimana anggota masyarakat mengenali masalah yang timbul akibat pembangunan infrastruktur pariwisata (Achilich, 2015; Ayu, 2014).

Analisis kesiapan masyarakat terkait KEK dianalisis dalam enam dimensi kesiapan (Plested *et al.*, 2006). Pertama, adanya upaya komunitas yang terdiri dari kelompok pegiat budaya dan pelaku pariwisata dalam menyikapi beredarnya satu isu besar dalam rencana pembangunan. Bagi pegiat budaya, seperti diungkapkan salah satu informan yang mengaku mengetahui informasi tentang KEK sejak tahun 2012, kegiatan ini termasuk dalam rangka pembentukan produk wisata *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* (MICE). Sedangkan pelaku pariwisata yang diwakili oleh informan yang bermata pencaharian pedagang dan pekerja swasta merasa harus menyambut baik rencana pembangunan besar tersebut, karena terkait dengan manfaat yang akan diperoleh jika rencana KEK dilaksanakan, meskipun belum mengetahui dampak ekologi, sosial, dan ekonomi.

Kedua, pengetahuan yang tersusun dalam dua komunitas menjadi sangat berbeda, dan pada akhirnya juga memiliki konsekuensi untuk pemahaman di komunitas lain. Pengetahuan komunitas pegiat budaya didapat dari luar komunitas rencana pembangunan, sedangkan komunitas pelaku pariwisata mengetahui sebagian dari pemerintah desa dan sebagian besar dari rumor yang beredar. Selama ini, upaya pelibatan komunitas terlihat pada aktivis budaya yang lebih fokus mempertimbangkan isu ekologi.

Ketiga, kepemimpinan masih lebih menonjol di komunitas aktivis budaya yang mengklaim bahwa semua urusan KEK ditangani oleh mereka, termasuk lebih banyak berbicara tentang masalah ekologi (ancaman krisis air dan penjualan tanah yang sebenarnya merugikan masyarakat). Keempat, iklim komunitas yang dibangun cenderung menjadi komunitas pegiat budaya karena lebih pada dominasi eksistensi aktor intelektual. Paparan informan mengatakan bahwa sebagai komunitas mereka lebih suka menyepakati aturan dari pemerintah sebagai komunitas.

Kelima, pengetahuan masyarakat. Dari model pengetahuan yang didapatkan secara tidak utuh dan tidak transparan, memunculkan kekhawatiran akan ancaman ekologi seperti hilangnya sumber air, hingga rusaknya situs peninggalan Kerajaan Singosari. Perubahan pekerjaan juga menciptakan kekhawatiran bagi para aktor wisata. Keenam, masyarakat terancam oleh KEK saat ini pada tahap awal, yaitu ketidakjelasan informasi yang beredar di masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi catatan penting untuk mempersiapkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur besar.

Tolak ukur yang digunakan dalam menyatakan kesiapan komunitas pegiat budaya dan pariwisata dilihat dari faktor pengetahuan terkait KEK. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dua komunitas ini mengetahui bahwa wilayah Kecamatan Singosari telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Namun, sumber informasi hanya berasal dari rumor di antara mereka. Di sisi lain, pemerintah daerah

tidak pernah memberikan informasi tentang KEK kepada publik secara transparan. Dari level *vague awareness* ini, terlihat kesiapan kedua komunitas ini belum jelas. Anggota komunitas merasa ada masalah dari proses pengembangan KEK, tetapi tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu (Plested *et al.*, 2006), seperti mengorganisir masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pembangunan KEK. Dengan demikian, komunitas pegiat budaya dan pelaku pariwisata dalam penelitian ini dikategorikan dalam kesiapan yang tersamar (*vague awareness*).

Sebagai infrastruktur berskala besar, informasi tentang pengembangan KEK harus disebarluaskan secara terbuka, sehingga komunitas lokal dapat mengetahui potensi atau peluang yang dapat dimanfaatkan, dan dapat mengetahui potensi dampaknya. Hal ini karena anggota komunitas mampu mengenali masalah dan kebutuhan kelompoknya (Achilich, 2015) atas perubahan yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, komunitas ini dapat ikut serta mencari solusi untuk menghadapi potensi dampak negatif yang nantinya dapat ditimbulkan oleh KEK.

Dengan gambaran situasi di atas, industri pariwisata yang diusung KEK Singhasari masih jauh dari model pariwisata berkelanjutan. Basis pariwisata berkelanjutan umumnya berupa jaminan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, ekologi, dan budaya bagi masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini karena sumber daya alam dibangun secara sosial dan masyarakat lokal adalah kunci dari konservasi atau kerusakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam pembangunan tersebut (Richards & Hall, 2002). Model pariwisata berkelanjutan berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap budaya dan sumber daya alam lokal, di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jika komunitas lokal saling terkait dengan industri pariwisata, maka dimungkinkan untuk membentuk pariwisata yang berkelanjutan (Ayu, 2014).

Maka, pelibatan komunitas pegiat budaya dan pelaku pariwisata dalam proses pembangunan KEK merupakan keniscayaan dalam membentuk industri pariwisata yang berkelanjutan. Namun, hal ini masih jauh dari kenyataan ketika tidak adanya keterbukaan informasi yang menyebabkan komunitas setempat tidak siap untuk proses industrialisasi yang lebih besar.

4.2. Interpretasi Masyarakat terhadap Pembangunan KEK di Masa Pandemi

Tak bisa dipungkiri, industri pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul akibat COVID-19. Organisasi UNWTO melaporkan penurunan pendapatan dari sektor ini sebesar 22% dalam empat bulan pertama tahun 2020. Sedangkan pada Maret 2020, terjadi penurunan pendapatan sekitar USD 80 miliar (United Nations World Tourism Organization, 2020). Ada sekitar 50 juta pekerjaan di sektor pariwisata global yang berpotensi hilang (Faus, 2020). International Labour Organization (ILO) juga menghitung, di 14 negara Asia Pasifik, terdapat 15,3 juta pekerja sektor pariwisata, dengan komposisi 6,4 juta perempuan dan 8,9 juta laki-laki, berisiko terkena pandemi COVID-19. Belum lagi pekerja informal di sektor pariwisata juga terkena dampaknya (International Labour Organization, 2020).

Selain berdampak pada pekerja sektor pariwisata, COVID-19 juga telah mengubah perilaku wisatawan dunia. Uğur & Akbiyik (2020), yang melakukan penelitian dengan mencari di kolom komentar aplikasi TripAdvisor. Mereka menemukan bahwa penundaan atau pembatalan perjalanan adalah hal biasa selama penelitian karena semakin merebaknya wabah COVID-19 dan penyebaran informasi ke seluruh dunia terkait pandemi ini. Permintaan akan asuransi perjalanan juga menjadi temuan penting dari penelitian ini (Uğur & Akbiyik, 2020).

Selain dampak ekonomi dan perilaku di atas, yang patut mendapat perhatian adalah memastikan keselamatan pelaku wisata. Jadi, keselamatan penting bagi manusia selama ketidakpastian dan munculnya risiko akibat pandemi (Federici, 2020). Ketidakpastian muncul dari kontradiksi yang diciptakan oleh pandemi. Sebagai contoh, kebijakan *social distancing* dalam aktivitas manusia untuk mengurangi risiko penularan merupakan bentuk kontradiksi dari sifat sosial manusia, yang selalu perlu berinteraksi secara langsung (Federici, 2020). Menggunakan perspektif Federici, pembangunan KEK Singhasari selama pandemi ini juga menunjukkan kontradiksi situasi.

Salah satu wawancara dengan penggiat budaya melalui Google Meet menyatakan bahwa pembangunan daerah berbasis infrastruktur fisik sudah tidak diperlukan lagi. Hal ini karena kawasan, pusat, atau area perlu dipahami kembali agar tidak lagi menjadi ruang fisik melainkan ruang digital. Hal ini sejalan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang memaksa manusia untuk menjaga jarak dan mengurangi interaksi langsung. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi bagaimana interaksi antar manusia berubah. Pembangunan infrastruktur fisik di KEK tidak diperlukan lagi karena telah digantikan oleh teknologi digital dan dipicu oleh kondisi pandemi. Perkembangan KEK pada sektor wisata *heritage* berbanding terbalik dengan inovasi yang dilakukan industri pariwisata di masa pandemi (Gunagama *et al.*, 2020).

Dengan demikian, munculnya risiko dan ketidakpastian akibat pandemi menciptakan kebutuhan akan jaminan keselamatan manusia. Keselamatan manusia tidak hanya terkait dengan wisatawan, tetapi masyarakat lokal juga harus dijamin keselamatannya. Lalu, apakah jaminan keselamatan manusia sudah didapatkan oleh komunitas penggiat budaya dan pelaku pariwisata dalam penelitian ini? Pandemi COVID-19 tidak mengubah rencana pengembangan KEK Singhasari di ketiga desa tersebut. Karena telah disahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019, proyek nasional seluas 120,3 hektar ini akan dilanjutkan sebagai pusat pengembangan industri pariwisata dan zona pengembangan teknologi digital. Pandemi COVID-19 tidak akan menghentikan proses pembangunan tetapi hanya akan memperlambatnya. Namun sayangnya, selama proses penelitian, tidak ada wacana tentang jaminan keamanan bagi komunitas penggiat budaya dan pariwisata, baik dari segi kesehatan, penghidupan, maupun akses terhadap sumber daya alam.

Di sisi lain, proses FGD dengan anggota organisasi aktivis budaya menemukan perspektif lain. Anggota organisasi ini menyatakan bahwa COVID-19 adalah “hukuman Tuhan” baik bagi pengembang KEK, pemerintah, maupun swasta. Hukuman tersebut berupa tidak segera terselesaikannya KEK Singhasari. Dengan adanya wabah dengan model mitigasi pembatasan sosial, proses pembangunan tidak semulus sebelum pandemi. Misalnya, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepanjang Mei 2020, akibat tingginya lonjakan kasus positif di Kecamatan Singosari, membuat proses pembangunan berjalan lambat. Sebagai contoh, proses jual beli tanah antara petani pemilik lahan dengan pengembang KEK tidak secepat sebelum pandemi.

Menarik untuk melihat bagaimana interpretasi “hukuman Tuhan” ini berkembang di antara para peserta diskusi. Interpretasi ini muncul ketika informasi tentang pengembangan KEK tidak disampaikan secara terbuka kepada publik. Demikian pula, pemerintah daerah belum pernah secara resmi membahas dan mensosialisasikan penilaian dampak jika KEK dibangun. Banyak pertanyaan yang muncul dalam diskusi ini, seperti bagaimana distribusi air yang seharusnya mudah dimiliki masyarakat dialihkan untuk pengembangan KEK? Berapa hektar lahan yang akan diubah menjadi lokasi wisata? Apakah ada lokasi situs cagar budaya dari Kerajaan Singosari yang akan menanggung resiko kerusakan jika dilakukan proses

konstruksi? Bagaimana dengan ketimpangan ekonomi ketika KEK telah dibangun? Akankah proyek ini membawa kemakmuran ekonomi dan ekologi bagi komunitas lokal secara berkelanjutan?

Interpretasi di atas tidak lahir begitu saja. Penutupan informasi publik dan pengembangan KEK akhirnya menimbulkan *vague awareness*. Dari model *vague awareness* ini, akhirnya dikorelasikan dengan pemberian interpretasi bencana pandemi. Penyematan istilah “hukuman Tuhan” ditujukan kepada pemerintah daerah dan pihak swasta yang menjadi penggagas dan pengembang KEK Singhasari. Pandemi adalah hukuman dari Tuhan bagi mereka yang tidak memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan KEK.

Bagaimana peristiwa pandemi dianggap sebagai peristiwa bencana dapat dilihat melalui karya Huet. Melalui buku “The Culture of Disaster”, Huet (2012) menjelaskan bahwa wabah kolera yang melanda Eropa pada tahun 1831 lebih dari sekadar masalah kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, Huet menunjukkan bahwa epidemi kolera adalah masalah kontrol politik dan sosial. Dari situ, ia menyatakan bahwa merebaknya peristiwa tersebut membuka tabir karakter masyarakat setempat dan menguji pola kebijakan pemerintah.

Jadi, ketika ada kebijakan pengembangan KEK, dan publik hanya mengetahui informasi melalui rumor, itu menunjukkan bagaimana pemerintah memperlakukan warganya dalam hal informasi publik. Meski begitu, dengan gambaran bagaimana pengembang KEK pemerintah dan swasta saat pandemi muncul, tidak ada satu pun model bantuan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi pembangunan yang menunjukkan bagaimana warga diperlakukan. Masyarakat ketiga desa tersebut tidak menjadi subyek pengembangan industri pariwisata. Mereka hanya penonton dan penjual tanah.

5. Kesimpulan

Penelitian yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa kesiapan komunitas pegiat budaya dan penggerak pariwisata berada pada tingkat *vague awareness*. Hingga lebih dari satu tahun proses pembangunan, yakni pertengahan 2020, informan hanya mengetahui informasi pembangunan KEK berasal dari rumor di antara mereka sendiri. Adapun informasi yang berasal dari pejabat setempat tidak pernah didapatkan secara detail. Hal ini diduga terkait dengan tertutupnya informasi publik terkait proses pembangunan KEK.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 menghambat perkembangan KEK yang dimaknai oleh informan sebagai bentuk hukuman dari Tuhan kepada penyelenggara dan pengembang KEK akibat minimnya informasi yang disampaikan kepada publik. Ketiadaan jaminan keamanan dan kesehatan bagi warga selama masa pandemi juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, komunitas lokal mungkin tidak diperlakukan sebagai subjek aktif pembangunan tetapi hanya sebagai objek pembangunan pasif. Situasi ini berpotensi mempengaruhi model pengembangan industri pariwisata yang partisipatif dan berkelanjutan.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Achilich, K. D. (2015). *Using The Community Readiness Model as a Framework to Understand a Community's Preparedness to Increase Food Access* (Master's dissertation). University of Vermont. Retrieved from <https://scholarworks.uvm.edu/graddis/504/>
- Ayu, R. (2014). Sustainable Tourism on Semau Island: Ready or not? *Journal of Tourism & Hospitality*, 03(03). <https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000133>
- Candra, L. F. K., & Rekha, A. (2020). The Effects of Pandemic Era to Tourism Industry in Tangerang. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 3(2), 169-175. <https://doi.org/10.17509/jithor.v3i2.25664>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2010). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2019). KEK Singhasari. Retrieved from <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Singhasari>
- Dey, I. (1993). *Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists* (1st ed.). London, United Kingdom: Routledge.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. (2015). *Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang 2011-2015*. Malang, Indonesia: Author.
- Edwards, R. W., Jumper-Thurman, P., Plested, B. A., Oetting, E. R., & Swanson, L. (2000). The Community Readiness Model: Research to Practice. *Journal of Community Psychology*, 28(3), 291-307.
- Fathurrahim, F. (2020). Pariwisata NTB dalam Lingkaran COVID-19. *Media Bina Ilmiah*, 15(2), 4057-4062. <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/703>
- Faus, J. (2020, March 17). This is how coronavirus could affect the travel and tourism industry. Retrieved from <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation/>
- Federici, R. (2020). An Uncertain Global Environment. Social Extremity, and Sociology of COVID-19. *Biomedical Journal of Scientific & Technical Research*, 26(4). <https://doi.org/10.26717/bjstr.2020.26.004388>
- Gunagama, M. G., Naurah, Y. R., & Prabono, A. E. P. (2020). Pariwisata Pascapandemi: Pelajaran Penting dan Prospek Pengembangan. *LOSARI : Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*, 56-68. <https://doi.org/10.33096/losari.v5i2.76>
- Huet, M.-H. (2012). *The Culture of Disaster*. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.
- International Labour Organization. (2020, April 24). COVID-19 and employment in the tourism sector: Impact and response in Asia and the Pacific. Retrieved from https://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_742664/lang-en/index.htm
- Kaushal, V., & Srivastava, S. (2021). Hospitality and tourism industry amid COVID-19 pandemic: Perspectives on challenges and learnings from India. *International Journal of Hospitality Management*, 92, 102707. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102707>
- Krisnawati, L., & Suprihardjo, R. D. (2014). Arahan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Singosari Malang sebagai *Heritage Tourism*. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 154-159. Retrieved from <https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/7249>

- Lintjewas, A. R., Franklin, P., & Rate, J. V. (2015). Studi Kesiapan Masyarakat terhadap Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Bitung. *Spasial : Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2(1), 48–54. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/8300>
- Nian, S., Zhang, J., Zhang, H., Zhang, J., Li, D., Wu, K., . . . Yang, L. (2019). Two Sides of a Coin: A Crisis Response Perspective on Tourist Community Participation in a Post-Disaster Environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(12), 2073. <https://doi.org/10.3390/ijerph16122073>
- Nunkoo, R., & Ramkissoon, H. (2011). Developing a community support model for tourism. *Annals of Tourism Research*, 38(3), 964–988. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.01.017>
- Plested, B. Edwards, R. W., & Jumper-Thurman, P. (2006). *Community Readiness: A handbook for successful change*. Sage Hall, Colorado State University: Tri-Ethnic Center for Prevention Research,. Retrieved from https://tec.colostate.edu/wp-content/uploads/2018/04/CR_Handbook_8-3-15.pdf
- Rachman, N. A., & Syamsudin, S. (2019). Analisis Persepsi dan Kesiapan Masyarakat Pandeglang dalam Menghadapi Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Zona Pariwisata Tanjung Lesung. *Sains Manajemen*, 4(2), 107-124. <https://doi.org/10.30656/sm.v4i2.843>
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176. Retrieved from <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/pp68-2019bt.pdf>
- Riadil, I. G. (2020). Tourism Industry Crisis and its Impacts: Investigating the Indonesian Tourism Employees Perspectives' in the Pandemic of COVID-19. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 4(2), 98–108. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.54>
- Richards, G., & Hall, D. (2002). The community: a sustainable concept in tourism development? In G. Richards & D. Hall (Eds.), *Tourism and Sustainable Community Development* (2nd ed., pp. 1–13). London, United Kingdom: Routledge.
- Rosyadi, S. (2021). Government Capacity in Recovering Tourism Sector in the Pandemic Period: Comparison between Indonesia and Thailand. *Insignia Journal of International Relations, Edisi Khusus "Navigating Global Society in the Disruptive Era"*, 48–56. Retrieved from <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/3827>
- Uğur, N. G., & Akbiyık, A. (2020). Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. *Tourism Management Perspectives*, 36, 100744. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100744>
- United Nations World Tourism Organization. (2020). Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism | UNWTO. Retrieved from <https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-COVID-19-outbreak-on-international-tourism>

Tentang Penulis

1. **Lutfi Amiruddin** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia. Minat penelitiannya adalah studi bencana dan studi pariwisata.
E-Mail: amiruddin.lutfi@ub.ac.id
2. **Genta Mahardhika Rozalinna** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia. Minat penelitiannya adalah perempuan dalam ekologi dan sosiologi korupsi.
E-Mail: gmroزالinna@ub.ac.id
3. **Primadiana Yunita** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.
E-Mail: primadiana@ub.ac.id